

IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DI BAWAH TEKANAN (*DURESS*) ATAU PAKSAAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2935 K/PDT/2013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tekanan atau paksaan dalam pembuatan perjanjian serta implikasi hukumnya menurut sistem hukum perdata Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan konsep paksaan dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPdata, teori kebebasan berkontrak, serta doktrin *misbruik van omstandigheden* yang memberikan perspektif lebih luas terhadap bentuk tekanan nonfisik dan ketidakseimbangan posisi tawar. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2013, penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan psikologis, suasana penyidikan, ancaman penahanan, serta pemanfaatan posisi lemah pihak lain merupakan indikator kuat adanya cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian. Hasil analisis juga menemukan bahwa perjanjian yang dibuat di bawah tekanan tidak hanya dapat dibatalkan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum lain, seperti hilangnya kekuatan pembuktian perjanjian dan potensi tanggung jawab perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang rentan serta memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak hanya berlaku apabila kesepakatan lahir dari kehendak bebas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan konsistensi penerapan doktrin cacat kehendak guna menjamin keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.

Kata kunci: paksaan, tekanan, cacat kehendak, kebebasan berkontrak, *misbruik van omstandigheden*, perjanjian.

**IMPLICATIONS OF CIVIL LAW ON THE VALIDITY OF AGREEMENTS MADE
UNDER PRESSURE (DURESS) OR COERCION: A STUDY OF SUPREME COURT
DECISION NO. 2935 K/PDT/2013**

ABSTRACT

This study aims to analyze the elements of pressure or duress in the formation of agreements and their legal implications under Indonesian civil law. The research focuses on the application of duress as regulated in Articles 1320 and 1321 of the Indonesian Civil Code, the principle of freedom of contract, and the doctrine of misbruik van omstandigheden, which provides a broader understanding of non-physical pressure and imbalanced bargaining positions. Using a normative juridical approach supported by a case study of Supreme Court Decision No. 2935 K/Pdt/2013, this study demonstrates that psychological pressure, investigative circumstances, threats of detention, and the exploitation of a weaker party constitute strong indicators of defective consent in contract formation. The findings also show that agreements concluded under duress may not only be annulled but may additionally result in other legal consequences, such as the loss of evidentiary force and the potential imposition of civil liability on the basis of tort. The Supreme Court's ruling underscores the role of law as a protective mechanism for vulnerable parties and reaffirms that the principle of freedom of contract is valid only when consent is given freely and voluntarily. Accordingly, this research highlights the need for stronger regulation and more consistent judicial application of the doctrine of defective consent to ensure substantive justice within contractual relations.

Keywords: duress, pressure, defective consent, freedom of contract, misbruik van omstandigheden, agreement.